

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Langkah- langkah Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI.....	21
A. Teori Hierarki.....	21
B. Teori Hubungan Pusat dan Daerah.....	22
C. Teori Kewenangan.....	27
D. Teori Pengujian Perda.....	27
E. Teori Peraturan Perundang-undangan.....	29

BAB III PELAKSANAAN SUPERVISI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT MELALUI FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	46
A. Pelaksanaan supervise dikaitkan dengan fungsi pendampingan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan Perda Provinsi Jawa Barat.....	46
B. Kendala pelaksanaan supervise yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dikaitkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas hukum, dan teori hukum.....	54
C. Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan supervise yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.....	59
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN:	
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI R.I. NOMOR 80 TAHUN 2015	
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	